



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ALI HASMI bin UCAK, tempat dan tanggal lahir Lempuh, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di dusun linung bulen kampung bener pepanyi kec.permata kab.bener meriah, sebagai **Pemohon I**;

JEMIAH binti AHMAT, tempat dan tanggal lahir Lempuh, 2 April 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di dusun linung bulen kampung bener pepanyi kec.permata kab.bener meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 1980** Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str



dilaksanakan di Kampung **Leme**, Kecamatan **Belang Kejeren**, Kabupaten **Gayo Lues**;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah **Ayah Kandung** Pemohon II yang bernama **Ahmat** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Bakri** dan 2. **Ridwan**, dengan mahar **6 gram emas** tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai **2 (Dua)** orang anak yang bernama : 1) **Asmaini** umur **19** tahun, 2) **Darmawati** umur **13** tahun

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;

9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ali Hasmi bin Ucak**) dengan Pemohon II (**Jemiah binti ahmat**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 Mei 1980** di Kampung **Leme**, Kecamatan **Belang Kejeren**, Kabupaten **Gayo Lues**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 17 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim memberikan nasehat agar menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para Pemohon tinggal, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang senyatanya sama dengan yang ada di permohonan para Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str



2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat asli dari reje Kampung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi KK atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi

Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam yang bernama :

1. Kamisin bin Hasan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohn II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-Istri;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut agama dan menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada waktu ijab-qobul dan peyerahan mahar disaksikan oleh saksi sendiri dan para keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak dinikahkan di KUA karena KUA jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan para Pemohon telah memiliki dua orang anak;
- Bawah para Pemohon sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bawah para Pemohon membutuhkan penetapan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan anak-anaknya;

2. Binti binti Abu Bakar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah saudari saksi mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa waktu para Pemohon menikah status Lajang dan Perawan tidak ada yang keberatan para Pemohon menikah;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi hadir sebagai saksi nikah yang ditunjuk;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam dan mereka tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA karena Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II di saksikan saksi sendiri yang ditunjuk sebagai saksi nikah serta para keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sekarang masih dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan untuk kepastian hukum pernikahannya dan melengkapi administrasi kependudukan para pemohon dan pembuatan akta kelahiran anak-anak kandung para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan tenggang waktu

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini bersifat voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukt surat bukti P. 1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena surat-surat ini tidak membuktikan langsung status perkawinan para pemohon maka sebagai bukti permulaan, untuk itu para

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi sesuai dengan pasal 172, 308, dan 309 R.Bg maka perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menghadirkan pendapat para pakar fiqh yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-anwar Jilid II hal. 146 yang berbunyi sebagai berikut "jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."
- Bahwa sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV hal.254 dan dalam Kitab Mughnil Mumtaz juz 12 hal.125 yang berbunyi "dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa para pemohon menikah pada hari hari **Rabu** tanggal **20 Mei 1980** di Kampung **Leme**, Kecamatan **Belang Kejeren**, Kabupaten **Gayo Lues**;
2. Bahwa yang menikahkan adalah Abang kandung Pemohon II;
3. Bahwa pada waktu Ijab-qabul dan peyerahan mahar **10 gram emas** disaksikan **Abu** dan **Lesu** sebagai saksi nikah yang ditunjuk serta keluarga para pemohon;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan menikah secara agama Islam dan Undang-undang Perkawinan;
5. Bahwa anak para Pemohon adalah 5 (lima) orang yang bernama : 1. Kadri, 2. Fatimah, 3. Santi, 4. Asmaini dan 5. Parmawati;
6. Bahwa perkawinan para pemohon tidak didaftarkan di kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para pemohon karena Kantor urusan agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas pernikahan tersebut Para pemohon telah memiliki dua orang anak dan membutuhkan akta kelahiran untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan para Pemohon terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai menurut Syari'at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama berdasar pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon telah sesuai dengan huruf (e) yang bunyinya "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e)) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal ini menjadi dasar persangkaan hakim permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon untuk di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015** Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **ALI HASMI bin UCAK**, dengan Pemohon II, **JEMIAH binti AHMAT**, yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 1980** di Kampung **Leme**, Kecamatan **Belang Kejeren**, Kabupaten **Gayo Lues**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah** ke dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh NOR SOLICHIN, S.H.I sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh SUKNA,
S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

SUKNA, S.Ag

NOR SOLICHIN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2020/MS.Str